

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

- A.G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anthony, Robert N. Dan David W. Young, 2003. *Management Control in nonprofit Organizations*, 7th Ed. McGrawa-Hill.
- Djunaedi, Achmad. 2002. Beberapa Pemikiran Penerapan *E-Government* dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington C: Congressional Quarterly Press
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork : McGraw-Hill.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta
- _____. 2004 *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi)* Yogyakarta
- Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 1983. *Implementation and public policy*. London: Scoot, Foresman and company
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementatio Process : A Conceptual FrameWork*. Sage Publication: Beverly Hill.
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nugroho Riant, 2007, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3, Jakarta: Elex Media Komputindo
- _____. 2015. *Policy Making*, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Yogyakarta
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosiasl Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.
- World Bank, 2002. New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina.*

Peraturan-Peraturan Dan Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Intsruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas Periode 2018-2023

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik.

Surat Edaran Walikota Nomor 489/SE.041-Diskominfo Perihal Standardisasi Aplikasi Persuratan, Website & Kewilayahan

Surat Edaran Walikota Nomor 102-DISKOMINFO/2022 Perihal Implementasi Aplikasi SIPAKU

Jurnal/Skripsi:

Adityo, B., Engkus, E., & Pikri, F. (2022). Komunikasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Dan Kependudukan Umum. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2).

Darmawan, I. (2011). *E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, 69-75.

Deken, S. (2011). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Keluarga Berencana (Sitikencana) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Fidowaty, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pembuatan Izin Mendirikan Bandungan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(2), 1-9.

Fidowaty, T., Nazsir, N., Suwaryo, U., & Deliarnoor, N. A. (2017, October). Policy Implementation Of Green Space In Bandung City Seen From Power,

- Interest, And Strategies Of Actor Involved Factor (Study About Park and City Forest). In International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017) (pp. 78-82). Atlantis Press.
- Hertiarani, W. (2016). Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(3), 419-440.
- Karniawati, N., & Rahmadani, R. (2011). Analisis Kebijakan Penerapan EGovernment Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)(Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Kautsar, Y. A., & Saefullah, D. (2022). Implementasi Kebijakan *E-Government* Pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kota Bandung. *Scientia Regendi*, 3(2), 01-14.
- Koesharijadi, K., Hardiyansyah, H., & Akbar, M. (2019). Implementasi Kebijakan *E-Government*, Komitmen, Pengembangan Aparatur Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 39-45.
- Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung. dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VI,(2).
- Kurniati, P. S. (2015). Policy Implementation of Electronic Identity Card (e-ID) in Cimahi City, West Java Province, Indonesia. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4(2), 31-41.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan *E-Government* Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6-14.
- Latif, yusuf abdul. (2011). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SIMYANDU-PPTSP) (Studi Kasus Dalam Pembuatan Izin Usaha (ITU) Pada Kantor PPTSP Kabupaten Garut)
- Lestari, S., Ginanjar, S. E., Sari, E., & Amir, H. D. (2022). Pelatihan Administrasi Kependudukan Bagi Ketua Rw Dan Rt Di Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 7-14.

- Maulana, A. (2022). Implementasi Kebijakan *E-Government* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Melta, Yogi Yolanda. (2018). Implementasi Kebijakan *E-Government* Tentang Bursa Kerja Online (Bkol) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 126-138.
- Ndoa, L. A., & Kurniati, P. S. (2022). Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 176-187.
- Ningrum, Vidya Marselia (2022) Implementasi Kebijakan *E-Government* Pada Pelayanan Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rahadi, Rahadi. (2021). Implementasi Kebijakan *E-Government* Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Tanggap Karawang (TANGKAR) Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Satiawati, W., & Rumapea, P. (2016). Implementasi Kebijakan *E-Government* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(400).

Rujukan Elektronik

- <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/153/1580/2/jumlah-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kota-bandung.html> (Diakses pada 9 juni 2023)
- <https://DISKOMINFO.bandung.go.id/detail-berita/rapat-persiapan-implementasi-SIPAKU> (Diakses pada 04 mei 2023)
- <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-132849021/SIPAKU-mudahkan-masyarakat-kota-bandung-mengurus-ktp-kk-dan-pengajuan-ahli-waris-begini-cara-pakainya> (Diakses pada 12 mei 2023)
- <https://SIPAKU.bandung.go.id/> (Diakes pada 04 mei 2023)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-> (Diakses pada 27 april 2023)